

## ABSTRAK SKRIPSI

Pemerintah selalu berupaya untuk menyempurnakan peraturan-peraturan dalam pasar modal, sebab pasar modal merupakan salah satu pendukung pembangunan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaannya pemerintah menunjuk Bapepam sebagai Badan Pengawas Pasar Modal untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal.

Tujuan utama dari Bapepam adalah melindungi investor. Perlindungan merupakan syarat penting untuk terciptanya pasar modal yang wajar dan teratur. Untuk menjamin adanya perlindungan yang dimaksud, Bapepam mengambil langkah dengan meningkatkan keterbukaan emiten. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dari pihak emitan dalam memberikan informasi mengenai kondisi badan usahanya. Keterbukaan ini harus dimulai sejak badan usaha menyatakan diri untuk mendaftarkan sebagai calon emiten di pasar modal. Agar Bapepam mempunyai keyakinan terhadap keterbukaan informasi mengenai kondisi badan usaha, Bapepam meminta agar badan usaha menyerahkan laporan perkembangan badan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari badan usaha sendiri keterbukaan bisa diwujudkan dengan mengundang akuntan publik yang independen untuk melakukan pemeriksaan akuntansi (audit) secara menyeluruh atas laporan keuangannya. Akuntan publik sebagai auditor harus benar-benar independen agar dapat bekerja sesuai dengan etika profesinya, sehingga pendapat (opini) yang diberikannya dapat dipercaya. Auditor akan memeriksa semua hal yang berhubungan dengan laporan keuangan badan usaha, mulai dari kelengkapan dan keakuratan dokumen-dokumen dasar sampai dengan ketepatan perlakuan akuntansinya.

Dalam melaksanakan tugasnya auditor melakukan berbagai prosedur audit sehingga pada akhir tugasnya auditor dapat memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan badan usaha. Apabila ada hal-hal yang sangat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka auditor akan mengungkapkannya dalam lembar pendapat (opini) auditor maupun dalam catatan atas laporan keuangan badan usaha. Dengan demikian keterbukaan informasi mengenai kondisi badan usaha dapat tercapai, dan laporan keuangan badan usaha tersebut bisa dipercaya.